



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

**DIREKTORAT PENGAWASAN
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA KELAUTAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan, karena atas karunia-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantudalam proses penyusunan laporan ini.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat PSDK atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025. Laporan ini menyajikan data, informasi dan gambaran tentang capaian berbagai kegiatan dan kendala dalam pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan kinerja Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ke depannya.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan ini agar sesuai dengan yang diharapkan serta dapat memberikan pandangan dan arah yang jelas sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan

Jakarta, 30 Januari 2026

Direktur Pengawasan Sumber
Daya Kelautan



Sumono Darwinto

EXECUTIVE SUMMARY

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2025-2029 yang tertuang dalam 6 sasaran kinerja dan 15 indikator kinerja. Adapun indikator kinerja dimaksud yaitu:

1. Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat (Nilai)
2. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan
3. Nilai kualitas supervisi intelijen kelautan
4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan
5. Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya kelautan
6. Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya kelautan
7. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan
8. Persentase penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
9. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSDK
10. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PSDK
11. Persentase Pelaksanaan Pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDK

12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP
14. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
15. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Pada tahun 2025, seluruh indikator kinerja yang dilakukan pengukuran telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kesebelas indikator kinerja selanjutnya diukur melalui aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) maka capaian kinerja Direktorat PSDK pada tahun 2025 ini menghasilkan nilai kinerja operasi (NKO) sebesar 104,3. Nilai ini mengindikasikan kinerja Direktorat PSDK termasuk dalam kategori baik.

Alokasi anggaran Direktorat PSDK pada tahun 2025 adalah Rp 11.522.471.000,- namun karena kebijakan efisiensi anggaran maka alokasi anggaran menjadi Rp 2.537.137.000,-. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.535.805.847,- sebesar 99,95%,-.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXCUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan	3
D. Tugas dan Fungsi	3
E. Struktur Organisasi	5
F. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	7
B. Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2025	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Tahun 2025	12
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	13
C. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	36
A. KESIMPULAN	36
B. REKOMENDASI	36

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Dengan luas wilayah perairan 6.400.000 km² dan panjang garis pantai kira-kira 108.000 km (KKP, 2024), potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki turut menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp. 76.395 miliar untuk harga konstan dan Rp. 555.04,20 miliar untuk harga berlaku pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan sebesar 7,57 persen, lebih besar dari laju pertumbuhan PDB nasional Indonesia dengan capaian 7,24 persen (KKP, 2024). Sektor kelautan dan perikanan yang turut menyumbang PDB berasal dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta industri pengolahan kelautan dan perikanan untuk konsumsi domestik maupun ekspor.

Pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang tentu juga mempengaruhi ketersediaan jumlah sumber daya alam yang pemanfaatannya juga semakin besar. Hal ini tentu bisa menimbulkan tidak hanya penurunan sediaan sumberdaya alam namun juga bisa menimbulkan kerusakan pada sumber daya alam yang dimanfaatkan karena kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia begitu beragam. Oleh karena itu, diperlukan penataan dan manajemen yang baik dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang tersedia, salah satunya sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan manajemen pemanfaatan dan pengelolaan yang baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang berkesinambungan dan dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu bagian dari kementerian dan/atau lembaga resmi negara sangat substansial perannya dalam mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. lebih lanjut, dalam rangka meminimalkan tingkat kerusakan yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, maka Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK) sebagai salah satu unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan agar dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab untuk menjaga manfaat, kelestarian maupun nilai dan fungsinya sesuai dengan amanat UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2025, dilaksanakan oleh Direktorat PSDK untuk mewujudkan kepatuhan pelaku usaha kelautan. Untuk mewujudkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat PSDK sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengukuran kinerja Direktorat PSDK tahun 2022 ditetapkan dilakukan secara berkala melalui beberapa mekanisme yaitu (1) pengukuran kinerja periode bulanan; (2) pengukuran kinerja periode triwulan; dan (3) pengukuran kinerja periode tahunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur PSDK atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun

2025 adalah sebagai bahan rujukan dalam merumuskan berbagai rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan pada tugas pengawasan pada masa tugas selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja pada periode tahun 2025.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Isu aktual dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan tahun 2025 yang menjadi fokus pengawasan, antara lain:

1. Pemanfaatan ruang laut tanpa disertai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
2. Pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
3. Pemanfaatan air laut selain energi secara ilegal;
4. Penambangan pasir laut secara illegal;
5. Pemanfaatan pesisir untuk kegiatan reklamasi yang tidak berizin; dan
6. Pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh asing;
7. Kerusakan lahan pesisir akibat maraknya penambangan pasir;
8. Kerusakan ekosistem terumbu karang akibat kandasnya kapal;
9. Pencemaran perairan pesisir dan laut akibat kegiatan perikanan dan kapal bermuatan yang kandas atau bocor.

D. Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat PSDK bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat PSDK adalah:

1. Perumusan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, perusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,

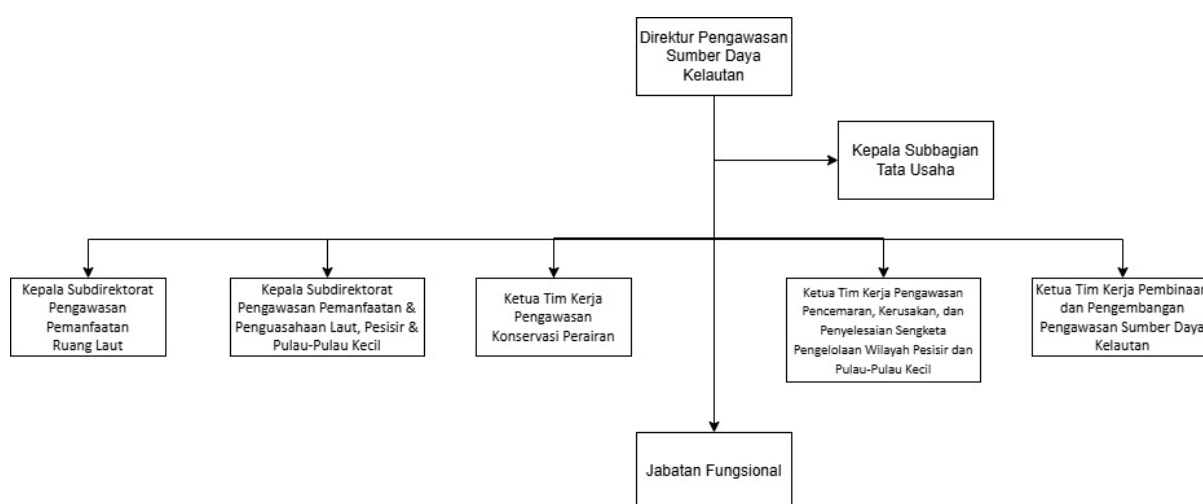
penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, pengusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, pengusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, pengusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan,

pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, pengusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; dan

6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

E. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktut Organisasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

F. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2025 disusun berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, isu aktual pengawasan sumber daya kelautan, dan tugas fungsi Direktorat PSDK.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang perencanaan pengawasan sumber daya kelautan pada tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Direktorat PSDK sampai dengan periode triwulan III tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan berpedoman pada 2 (dua) dokumen perencanaan, yaitu Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) 2025-2029 dan Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2025.

A. Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menetapkan arah kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor 9/PER.DJPSKDP/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: 23A/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Penetapan renstra Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025 – 2029 bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun kedepan. Dokumen renstra memuat sasaran pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun dan strategi untuk mewujudkannya.

Sasaran program Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan meliputi:

1. Meningkatnya kesadarantahuan masyarakat kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan
3. Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran strategis tersebut maka telah disusun program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Tabel 1. Program Dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029

No	Sasaran Program / Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kesadaran/tahuan Masyarakat Kelautan dan Perikanan						
1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif					
	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan	80	81	82	83	84
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan						
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif					
	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	100	100	100	100
	Nilai kualitas supervisi intelijen kelautan	75	76	77	78	79
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan					
	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82	83	84	85	86
	Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya kelautan	85	86	87	88	89
	Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya kealutan	80	81	82	83	84
4	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan						
6	Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan					
	Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80	81	82	83	84
7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
	Indeks profesionalitas ASN Direktorat PSDK	81	82	83	84	85
	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDK	86	87	88	89	90
	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Direktorat PSDK	100	100	100	100	100
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	86	87	88	89
	Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat PSDK	80	81	82	83	84
	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan	77	78	79	80	81

No	Sasaran Program / Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
	Direktorat PSDK					
	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDK	70	71	72	73	74

B. Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2025

Pada tahun 2025, Direktorat PSDK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 11.572.471.000,- namun karena kebijakan efisiensi anggaran maka menjadi Rp 2.880.644.000,- untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Adapun Klasifikasi Rincian Output (KRO) dari alokasi anggaran eksisting di Direktorat PSDK pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan produk, yang terdiri kegiatan supervisi pengawasan sumber daya kelautan, monev pengawasan sumber daya kelautan, dan bimtek pengawasan sumber daya kelautan;
2. Koordinasi pengawasan sumber daya kelautan yang terdiri dari koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan;
3. Pemeriksaan kepatuhan unit usaha kelautan yang kegiatan menimbulkan dampak secara nasional;
4. Fasilitasi dan pembinaan masyarakat yang bertujuan masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan;
5. Operasi inteleijen sumber daya kelautan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi perihal indikasi pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan;
6. Operasional dan pemeliharaan kantor di Direktorat PSDK; dan
7. Layanan umum rumah tangga di Direktorat PSDK.

Target pelaksanaan perencanaan kegiatan pengawasan bidang sumber daya kelautan tertuang dalam perjanjian kinerja. Tujuan khusus perjanjian kinerja yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan pelaksanaan pengawasan

pengelolaan sumber daya kelautan yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan sasaran kegiatan, maka disusun indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Direktorat PSDK tertuang dalam Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

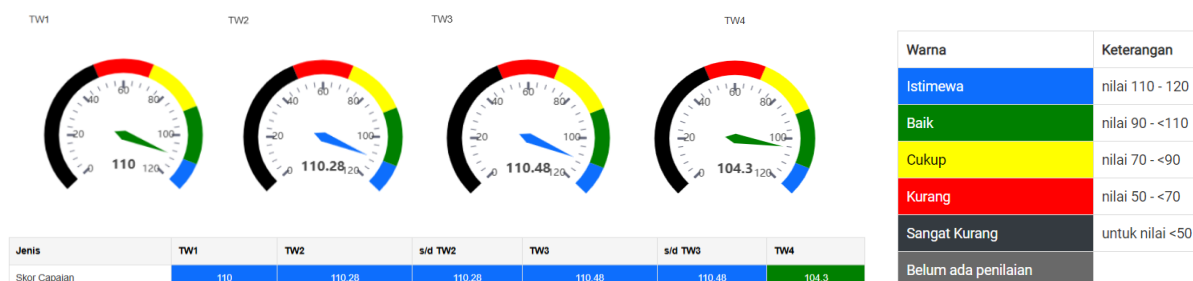
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PSDK Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	1. Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan (nilai)	80
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
		3. Nilai kualitas supervisi intelijen kelautan	75
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kealutan	82
		5. Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya kealutan	85
		6. Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya kelautan	80
4	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	7. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantuan dan pengawasan sumber daya kelautan	100%
5	Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan	8. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80%
6	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lancar dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	9. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSDK	81
		10. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDK	86
		11. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSDK	100%
		12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup	95%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Direktorat PSDK yang tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	
		13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat PSDK (nilai)	80
		14. Nilai inovasi layanan publik yang diterapkan Direktorat PSDK	77
		15. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDK	70

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Tahun 2025



Gambar 2. Diagram Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2025

Pengukuran kinerja dilakukan melalui aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Direktorat PSDK tahun 2025 menunjukkan nilai 104,3. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja Direktorat PSDK pada tahun 2025 termasuk dalam kategori baik. Adapun capaian indikator kinerja Direktorat PSDK tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat PSDK Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan (nilai)	80	89,20
2	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	98,00
3	Nilai kualitas supervisi intelijen kelautan	75	91,00
4	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82	94,00
5	Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya kelautan	85	93,53
6	Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya kealutan	80	97,50
7	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%	100
8	Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80%	63,75

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2025
9	Indeks profesionalitas ASN Direktorat PSDK	81	87,14
10	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDK	86	88,50
11	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja Direktorat PSDK	100%	100
12	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%	95
13	Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat PSDK	80	94,00
14	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat PSDK	77	81,30
15	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDK	70	80,01

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Direktorat PSDK telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif

1. Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan

Kegiatan penyadartahuan dilakukan Direktorat PSDK dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pemanfaatan sumber daya kelautan yang diharapkan menjadi upaya untuk meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Terhadap hasil kegiatan ini selanjutnya dilakukan penilaian kualitas pemahaman masyarakat kelautan melalui perhitungan survei dengan metode survei cluster random sampling dengan skala Likert. Adapun pengukuran kinerja untuk indikator “Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan” dilakukan dengan mengukur nilai rata-rata dari jumlah total nilai survei yang diisi peserta.

Tabel 4. Matriks Rekapitulasi Skor Hasil Survei Kegiatan Penyadartahuan Masyarakat Kelautan

NO	NAMA PELAKU USAHA	JENIS KEGIATAN	SKOR
1.	Jenggala Hill	Wisata	96
2.	Java Pama Temple	Pariwisata	100
3.	PONDOK JENGALA	RESORT	72
4.	BJTP GAMAT SUNSET	RESORT	90
5.	OISHI BAR N GRILL	RESTAURANT	68
6.	Jukung Dive Penida	Resort	100
7.	Selancar Nusa Abadi	Wisata	80
8.	The Palms Ceningan	Wisata	88
9.	PT Pretty Sally Indonesia	Pariwisata	84
10.	Bali cruises nusantara	Wisata	82
11.	Lembongan spa	Spa	86
12.	Fin Island Bar & Restaurant	Restaurant	100
13.	Two fish bali	Wisata	100
14.	Alas villa	Penginapan	98
15.	Villa Giyor	Penginapan	100
16.	Jenggala Hill	Wisata	84
17.	Java Pama Temple	Pariwisata	96
18.	PONDOK JENGALA	RESORT	90
19.	BJTP GAMAT SUNSET	RESORT	84
20.	OISHI BAR N GRILL	RESTAURANT	86
TOTAL			1782

Pada tahun 2025, kegiatan penyadartahuan dilaksanakan pada 4 Juli 2025 di Nusa Penida, Bali yang dilakukan terhadap para pemanfaat pulau-pulau kecil. Kegiatan dilakukan sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan capaian hasil survei adalah 89,20. Capaian ini masuk kedalam kategori ... dan telah melampaui target pada tahun 2025 yaitu 80. Keberhasilan capaian ini dapat diperoleh karena kegiatan penyadartahuan telah dilaksanakan terhadap peserta yang memang secara langsung telah beraktivitas dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Adapun kegiatan

penyadartahuan dilakukan dengan memberikan materi yang terdiri dari:

- Dasar hukum tentang perizinan dan pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil.
- Kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan berusaha bidang pemanfaatan pulau-pulau kecil.
- Petugas pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan
- Jenis sanksi administratif bidang pemanfaatan pulau-pulau kecil

SK. 01 Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif				
IKK. 01. 1 Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan				
Tahun 2024		Tahun 2025		Target Renstra
Target	Capaian	Target	Capaian	2029
-	-	80	89,2	84

Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun dan periode sebelumnya karena tahun 2025 merupakan periode renstra baru, yaitu renstra periode 2025 – 2029. Dan tidak dapat dibandingkan juga dengan eselon II lingkup Ditjen PSDKP karena objek penyadartahuannya berbeda.

Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif

2. Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan

Selain pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan, Direktorat PSDK juga memiliki tugas untuk melaksanakan operasi intelijen kelautan. Hasil operasi intelijen ini selanjutnya dapat digunakan sebagai informasi awal pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan. Pada tahun 2025, nilai kualitas operasi intelijen merupakan ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, ketepatan dan akurasi pelaksanaan kegiatan intelijen. Pengukuran kinerja untuk indikator “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan” dilakukan dengan mengukur nilai data intelijen kelautan.

Kegiatan operasi intelijen kelautan pada tahun 2025 dilaksanakan untuk kegiatan terhadap pembangunan pagar laut di perairan Kab. Tangerang. Adapun berdasarkan analisis tim intelijen Direktorat PSDK, hasil operasi dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar, namun dapat dibenarkan oleh sumber lain. Sehingga penilaian kualitas informasi operasi intelijen

keluatan dihitung sebagai berikut:

Capaian ini belum mencapai target yaitu 100, sedangkan capaian tahun 2025 sebesar 98 nilai ini dapat masuk kedalam kategori Hal ini menandakan kualitas operasi intelijen kelautan telah berjalan namun kualitas data yang didapat masih belum dibenarkan oleh pihak lain. Adapun tercapainya capaian ini didukung oleh adanya sumber daya manusia pelaksana operasi intelijen yang telah mendapatkan pelatihan intelijen yang disertai dengan dukungan anggaran operasi intelijen yang dikelola dengan efektif meskipun alokasi anggaran dimaksud terkena kebijakan efisiensi anggaran.

SK. 02 Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif				
IKK. 02. 2 Nilai kualitas operasi intelijen kelautan				
Tahun 2024		Tahun 2025		Target Renstra
Target	Capaian	Target	Capaian	2029
-	-	100	98	100

Capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun dan periode sebelumnya karena tahun 2025 merupakan periode renstra baru, yaitu renstra periode 2025 – 2029. Capaian ini juga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja pada Direktorat Jenderal PSDKP karena objek pengukuran ini berbeda.

3. Nilai Kualitas Supervisi Intelijen Kelautan

Selain melaksanakan operasi intelijen, Direktorat PSDK memiliki tugas untuk melaksanakan supervisi intelijen kelautan terhadap pelaksanaan operasi intelijen oleh UPT Direktorat Jenderal PSDKP. Supervisi intelijen kelautan merupakan kegiatan pendampingan pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan intelijen kelautan. Pengukuran kinerja “Nilai Kualitas Supervisi Intelijen Kelautan” pada tahun 2025 diukur dengan penyesuaian tahapan.

Pada tahun 2025, supervisi dilaksanakan terhadap hasil operasi intelijen kelautan yang telah dilakukan oleh Polsus PWP3K. Hasil supervisi dilakukan terhadap 30 operasi intelijen kelautan.

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh bahwa nilai kualitas supervisi intelijen kelautan 91,00. Capaian ini menandakan supervisi yang dilakukan Direktorat PSDK telah dilakukan dengan baik karena telah melampaui target yaitu 75.

SK. 02 Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif				
IKK. 02. 3 Nilai kualitas supervisi intelijen kelautan				
Tahun 2024		Tahun 2025		Target Renstra
Target	Capaian	Target	Capaian	2029
-	-	75	91	79

Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun dan periode sebelumnya karena tahun 2025 merupakan periode renstra baru, yaitu renstra periode 2025 – 2029. Capaian ini juga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja pada Direktorat Jenderal PSDKP karena objek pengukuran ini berbeda.

4. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat efektivitas, ketepatan dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaku usaha kelautan. Pengawasan sumber daya kelautan terdiri dari :

- a. Pengawasan rutin melalui OSS berdasarkan KP Nomor 10 Tahun 2021, Kegiatan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut yaitu :
 - Ekstraksi garam
 - Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (ALSE)
 - Penampungan dan penyaluran air baku (ALSE)
 - Wisata tirta lainnya
 - Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL (BMKT)
 - Penggalan pasir : pemanfaatan pasir laut
 - Pemanfaatan pulau-pulau kecil
 - Penyiapan lahan (Reklamasi)
 - Aktifitas kawasan alam lainnya (Kawasan konservasi)
- b. Pengawasan rutin selain melalui OSS yang terdiri dari :
 - Pengawasan PKKPR
 - Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil
 - Pengawasan reklamasi, dan
 - Pengawasan pencegahan pencemaran
- c. Pengawasan insidental

Pada tahun 2025 telah melakukan pengawasan oleh Direktorat PSDK sebanyak 11 (sebelas) pelaku usaha yang berlokasi di Kalimantan Timur, Sulawesi tenggara, Papua Barat Daya, Jawa Timur, NTT dan DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan 94, capaian ini masuk kedalam kategori nilai Capaian ini menandakan Direktorat PSDK telah dilakukan dengan baik karena telah melampaui target yaitu 82. Pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang telah mendapatkan bimbingan teknis sehingga pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan secara akuntabel. Lebih lanjut, terdapat dukungan anggaran yang yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pengawasan dimaksud.

SK.03 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan				
IKK.03.4 Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan				
Tahun 2024		Tahun 2025		Target Renstra
Target	Capaian	Target	Capaian	2029
-	-	82	94	86

Adapun capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun dan periode sebelumnya karena tahun 2025 merupakan periode renstra baru, yaitu renstra periode 2025 – 2029. Sedangkan capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja pada Direktorat Jenderal PSDKP dikarenakan berbedanya objek pengawasan dengan unit kerja lain.

5. Nilai Kualitas Supervisi Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya kelautan merupakan kegiatan pendampingan pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan.

Pada tahun 2025 kegiatan supervisi hasil pengawasan sumber daya kealutan dilakukan oleh Direktorat PSDK sebanyak 150. Supervisi dilakukan kepada hasil pengawasan sumber daya kelautan, antara lain :

No	Objek Pengawasan	Nilai Supervisi (a)	Supervisi yang dilakukan (b)
1	Pengawasan PRL	9.000	100
2	Pengawasan ALSE	3.900	39
3	Pengawasan Wisata Bahari	1.100	11
TOTAL		14.030	150
a/b			93,53

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh bahwa nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya kelautan adalah 93,53 dengan kategori Capaian ini mengindikasikan supervisi yang dilakukan Direktorat PSDK telah dilakukan dengan baik karena telah melampaui target yaitu 85. Adapun kegiatan supervisi dilakukan berupa

pendampingan terhadap pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan maupun pendampingan upaya tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh UPT Lingkup Ditjen PSDKP.

SK.03 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan				
IKK.03.5 Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya kelautan				
Tahun 2024		Tahun 2025		Target Renstra
Target	Capaian	Target	Capaian	2029
-	-	85	93,53	89

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun maupun periode sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja pada Direktorat Jenderal PSDKP karena objek perhitungannya berbeda dengan unit kerja lain.

6. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Kegiatan pembinaan pengawasan sumber daya kelautan merupakan pembinaan teknis kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam rangka penguatan fungsi pemerintah daerah dalam implementasi pengawasan sumber daya kelautan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas kelautan atau Polsus PWP3K lingkup UPT PSDKP maupun pemerintah daerah melalui kegiatan pelatihan dan/atau workshop untuk meningkatkan kemampuan teknis serta mewujudkan kesamaan persepsi dalam penerapan mekanisme pengawasan sumber daya kelautan.

Pada tahun 2025, sebanyak 5 (lima) pemerintah daerah yang diberikan pembinaan pengawasan dan 3 (tiga) kegiatan pengembangan pengawasan sumber daya kelautan. Sehingga berdasarkan penghitungan nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya kelautan adalah 97,5 dengan kategori

Pembinaan pengawasan SDK

No	Kegiatan	Jumlah
1	Pembinaan Pengawasan SDK terhadap Provinsi Banten	100
2	Pembinaan Pengawasan SDK terhadap Provinsi DKI Jakarta	100
3	Pembinaan Pengawasan SDK terhadap Provinsi Jawa Barat	100
4	Pembinaan Pengawasan SDK terhadap Provinsi Jawa Tengah	100
5	Pembinaan Pengawasan SDK terhadap Provinsi Sulawesi Utara	85
Total		485
Total/ Jumlah pembinaan		97

Tahapan pengembangan pengawasan SDK

No	Kegiatan	Jumlah
1	Workshop Pilot Drone	100
2	PSDK Learning Sesi 1	100
3	PSDK Learning Sesi 2	100
Total		300
Total/ Jumlah pembinaan		100

Capaian ini mengindikasikan nilai kualitas pembinaan dan pengembangan sumber daya kelautan sudah baik karena sudah melebihi target yaitu 80. Sehingga dapat disimpulkan pembinaan dan pengembangan berhasil karena sudah sesuai dengan tahapan.

SK.03 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan				
IKK.03.6 Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya kelautan				
Tahun 2024		Tahun 2025		Target Renstra
Target	Capaian	Target	Capaian	2029
-	-	80	97,5	84

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun maupun periode sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja pada Direktorat Jenderal PSDKP diakrenakan berbedanya objek perhitungan.

Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya Penyusunan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

7. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Indikator kinerja persentase penyelesaian rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan merupakan tanggung jawab Direktorat PSDK untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penyusunan Nosma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan.

Setiap produk kebijakan Direktorat PSDK diukur/dinilai indeks kualitasnya menggunakan skema sebagai berikut :

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Identifikasi substansi • Outline • Zero drat
2	Pelaksanaan	70	• Pembahasan draft • Uji publik draft • Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3	Pelaporan	15	Laporan dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP
Jumlah Nilai		100	

Sesuai dengan tahapan capaian pada tahun 2025 adalah 100% dimana capaian ini sama dengan target 100. Capaian ini didapat karena telah selesainya rancangan atau draft NSPK yang disusun oleh Direktorat PSDK dan telah disampaikan kepada bagian hukum, Setditjen PSDKP. NSPK yang telah dihasilkan pada tahun 2025 adalah Petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut, Petunjuk teknis pengawasan pemanfaatan air laut selain energi (ALSE), dan Petunjuk teknis pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Capaian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengawasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan bidang sumber daya kelautan.

SK.04 Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				
IKK.04.7 Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan				
Tahun 2024		Tahun 2025		Target Renstra
Target	Capaian	Target	Capaian	2029
-	-	100	100	100

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun dan periode renstra 2025 – 2029. Namun jika capaian dibandingkan dengan unit kerja pada Direktorat Jenderal PSDKP bisa disimpulkan persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Direktorat PSDK sama jika dibandingkan dengan Setditjen PSDKP, Direktorat PSDP Direktorat PP, Direktorat POA dan Direktorat PSP.

Setditjen	Dit. PSDK	Dit. PSDP	Dit. PP	Dit. POA	Dit. PSP
100	100	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya Penyelesaian Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Secara Efektif dan Sesuai Ketentuan

8. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah capaian pelaksanaan penanganan sengketa, berdasarkan tahapan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Permen KP 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kejadian yang harus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa WP3K antara lain kapal kandas, reklamasi, tumpahan minyak, pasir laut dan alih fungsi lahan serta kejadian kerusakan dan atau pencemaran lainnya.

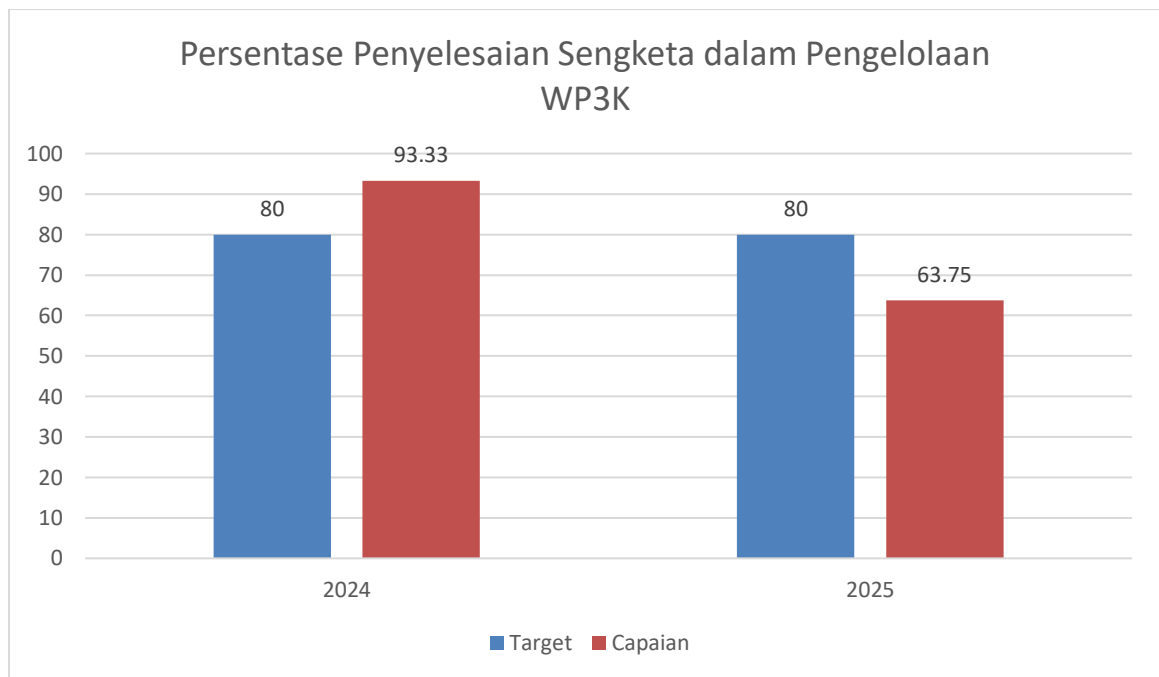
NO	SENGKETA	TAHAPAN	PERSENTASE TAHAPAN
1	BG SBS 3309 di Morowali	- Penanganan laporan - Survei internal - Verifikasi - Negosiasi	95
2	Yacht Pangaea Ocean Explorer di KKPN Waigeo Sebelah Barat	- Penelaahan Laporan	45

3	BG Finacia 92 di Perairan Pulau Kodingareng Keke Makassar	- Penelaahan Laporan	45
4	Kapal LCT Raymond di Derawan	- Pernyataan LoU dan Penelaahan Laporan - Survei Internal	70
Total			255
Total tahapan / total sengketa			63,75

Ada 4 (empat) sengketa yang ditangani oleh Direktorat PSDK dimana 2 sengketa masih sampai penelaahan laporan, 1 sengketa telah sampai tahap negoisasi dan 1 sengketa survei. Capaian ini tidak mencapai target yaitu 80% sedangkan capaian Direktorat PSDK hanya sebesar 63,75%. Hal ini dikarenakannya ketiadaan dukungan anggaran karena pada tahun 2025 alokasi anggaran untuk kegiatan ini akibat penerapan kebijakan efisiensi anggaran. Sehingga sengketa PWP3K tidak dapat dilakukan penyelesaian. Pada tahun selanjutnya akan dialokasikan anggaran untuk menyelesaikan sengketa PWP3K yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya.

SK.05 Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan							
IKK.04.8 Persentase penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil							
Tahun 2024		Tahun 2025		Target Renstra			
Target	Capaian	Target	Capaian	2026	2027	2028	2029
80	93,33	80	63,75	81	82	83	84

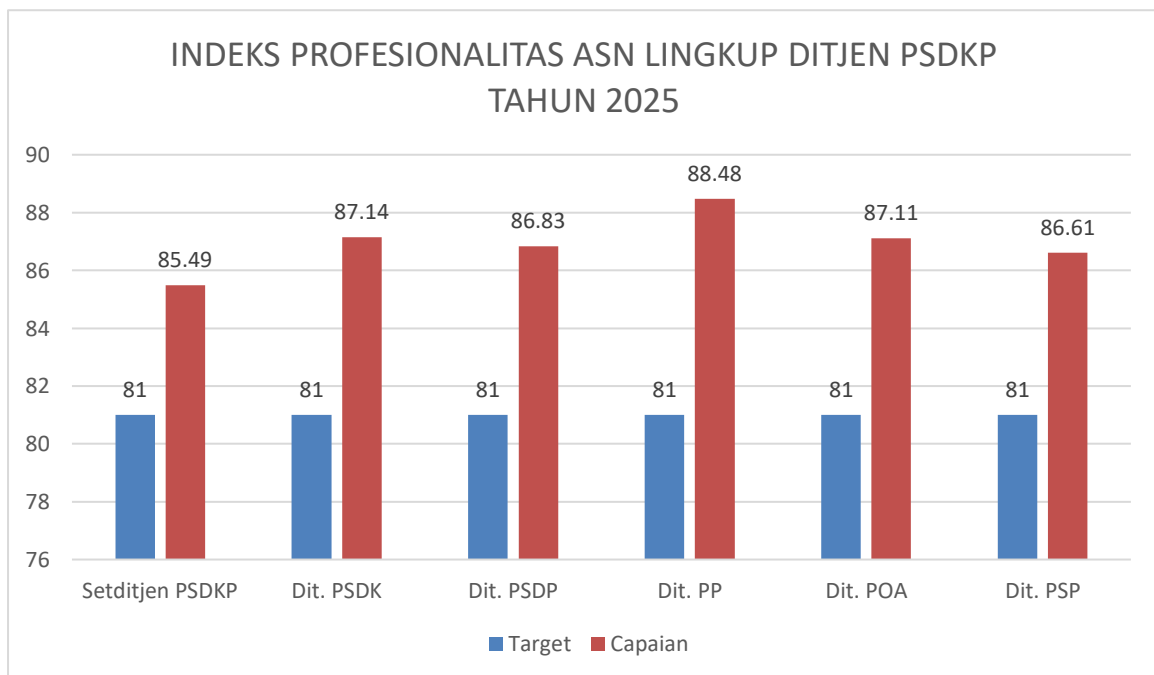
Capaian indikator ini menurun dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2024 yang sebelumnya 93,33%. Adapun indikator ini ada di Direktorat PSDK mengingat penyelesaian sengketa WP3K hanya ditangani oleh Direktorat PSDK saja.



Sasaran Kegiatan 6: Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

9. Indeks Profesionalitas ASN Direktora Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Indeks profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin per masing-masing pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Indeks bisa diperoleh dari laman ropeg.kkp.go.id dengan nilai 87,14.

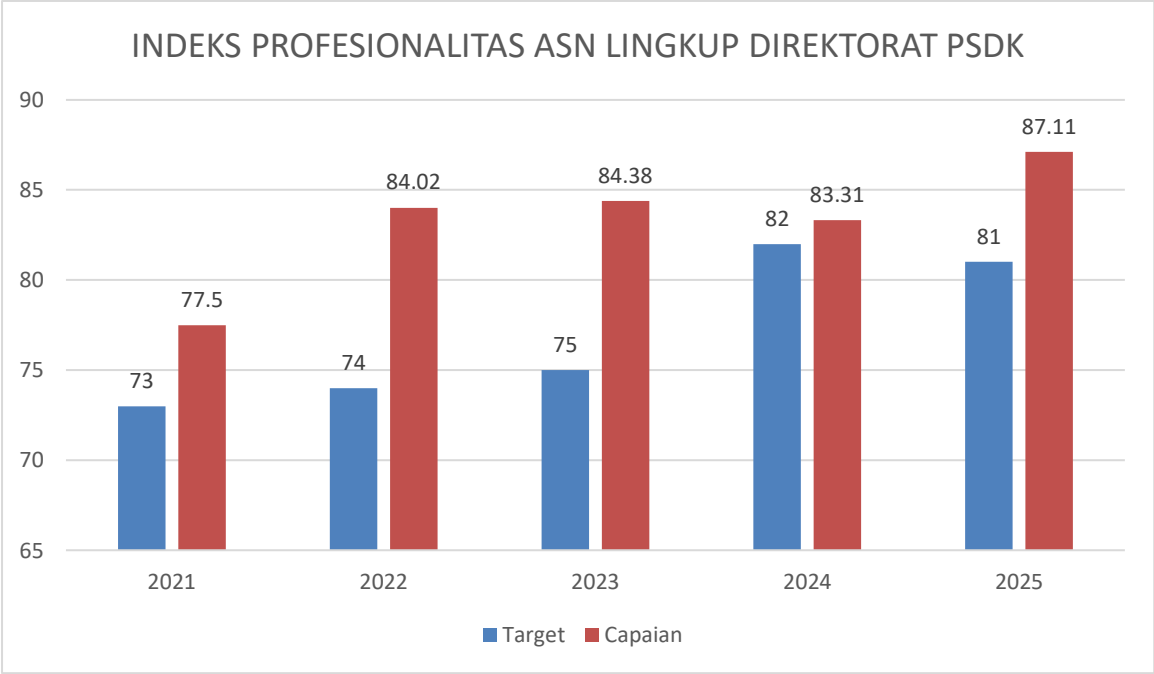


Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDK pada tahun 2025 adalah 87,14 nilai ini telah melampaui target pada tahun 2025 yaitu 81 dan dapat dikategorikan tinggi.

Disamping itu, capaian IP ASN Direktorat PSDK merupakan capaian lebih rendah apabila dibandingkan dengan Direktorat PP, namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan Setditjen PSDKP, Direktorat PSDP, Direktorat POA, dan Direktorat PSP.

Capaian indikator ini dipengaruhi oleh keaktifan pegawai lingkup Direktorat PSDK dalam mengikuti peningkatan kompetensi diri baik melalui pendidikan, pelatihan maupun seminar. Sebagai upaya perbaikan, seluruh pegawai lingkup Direktorat PSDK perlu lebih aktif mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi diri baik melalui pelatihan maupun pendidikan formal.

Apabila dibandingkan dengan capaian IP ASN Direktorat PSDK pada tahun 2021 - 2024 merupakan capaian tertinggi.



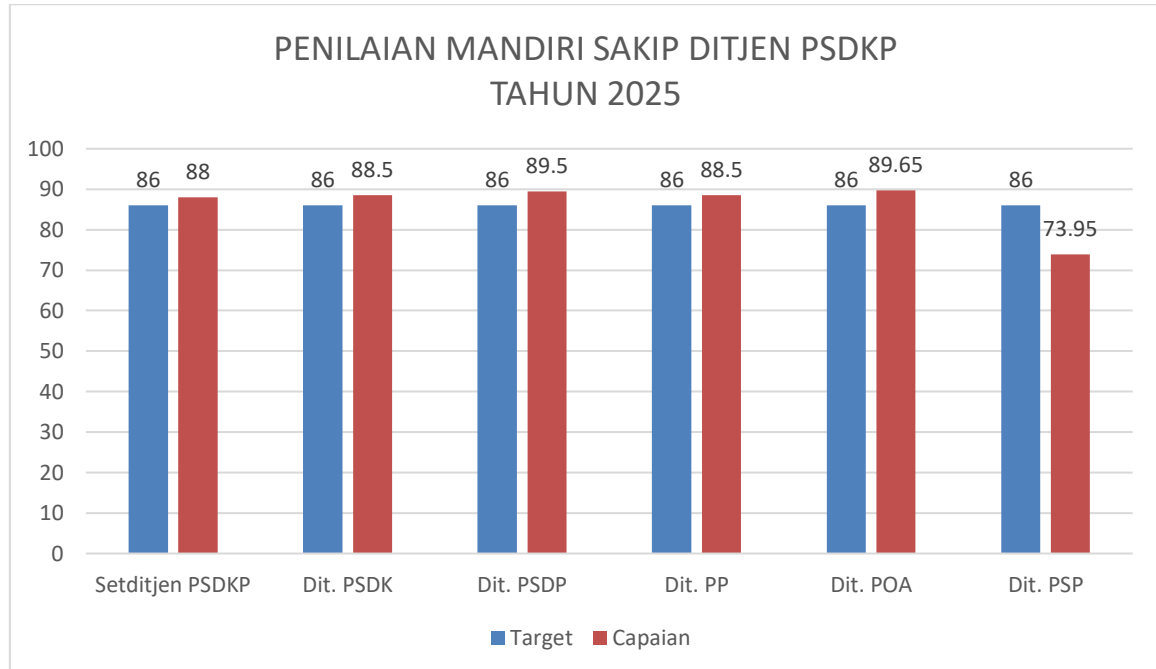
10. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

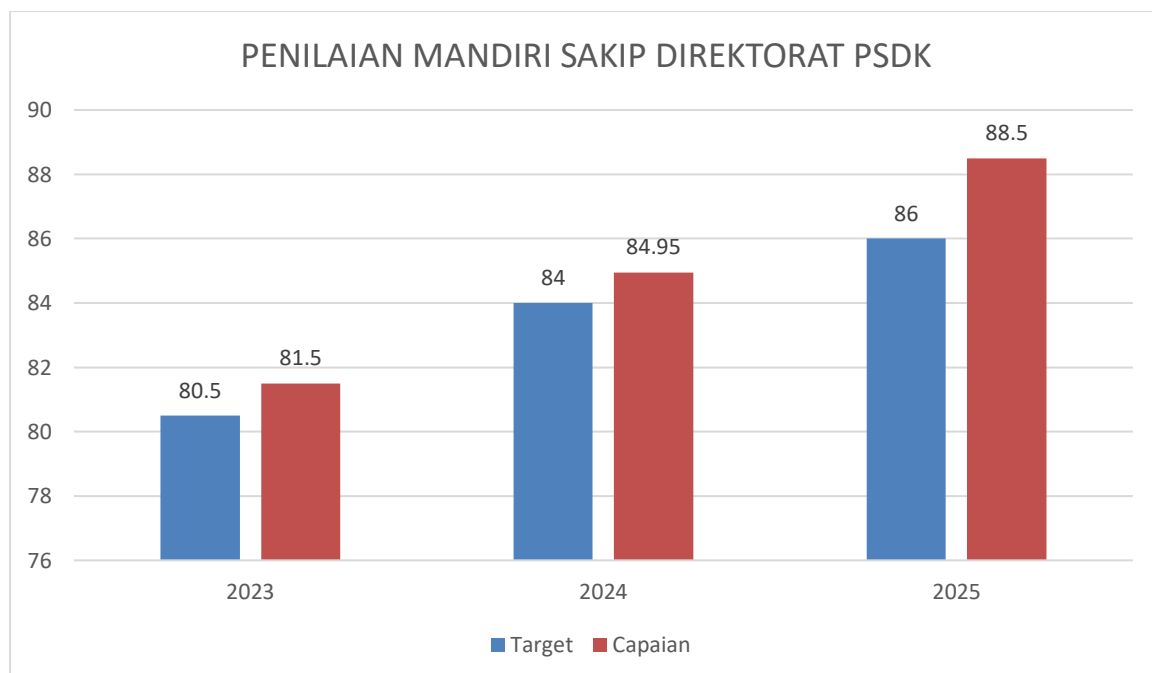
No	Unit Kerja	Nilai SAKIP	Predikat	Keterangan
3	Direktorat PSDK	88,50	A	Evaluasi AKIP Itjen

Pada Tahun 2025 Direktorat PSDK mendapatkan nilai 88,50 dengan kategori

nilai A. Capaian Direktorat PSDK apabila dibandingkan dengan unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, Direktorat PSDK lebih rendah dibandingkan dengan Direktorat POA, Direktorat PSDP dan lebih tinggi dibandingkan Setditjen PSDKP, Direktorat PP dan Direktorat PSP.



Capaian ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023, mengalami kenaikan dari 84,95 menjadi 88,50. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan penyusunan dokumen SAKIP dan pemanfaatannya dalam pengambilan kebijakan.



11. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDK

Pengendalian kerja sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi :

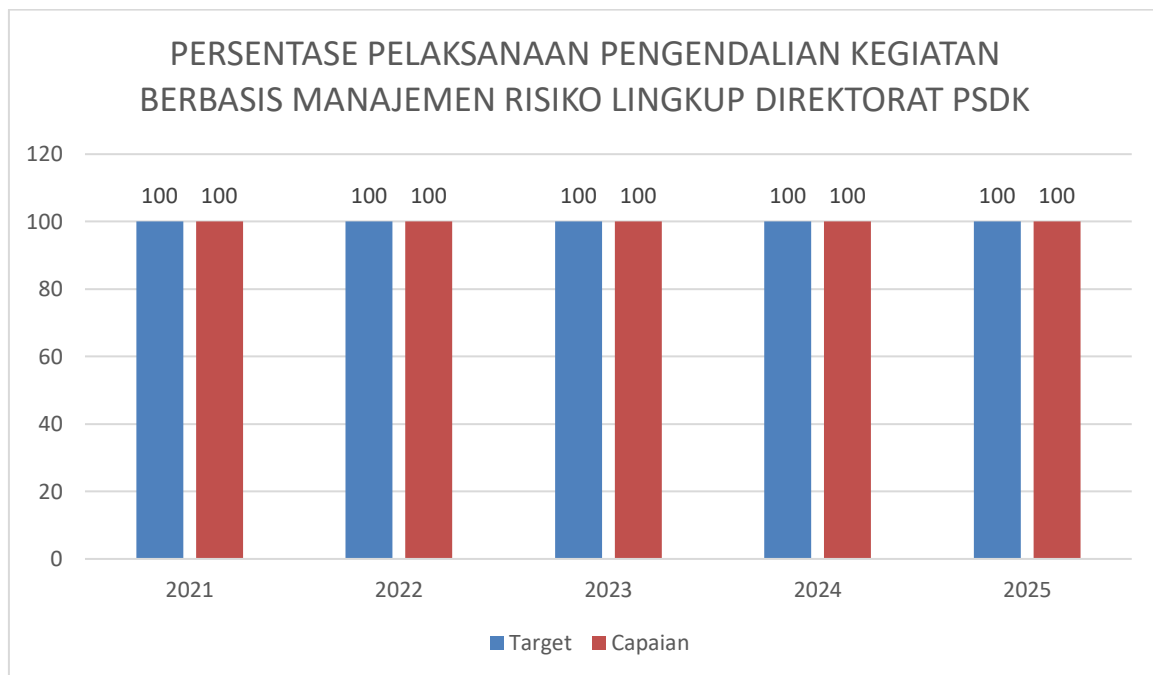
1. rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruhnya pada perubahan anggaran / kegiatan baru / struktur organisasi,
2. aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relative besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negative pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja,
3. pengadaan bara/jasa yang memiliki Tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar Kementerian.

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	5	5	100%
	Direktorat POA	25	25	100%
	Direktorat PSP	8	8	100%
	Direktorat PPSPDP	5	5	100%
	Direktorat PPSDK	7	7	100%
	Direktorat PP	11	11	100%

Pada tahun 2025, capaian untuk indikator ini adalah 100%. Capaian ini mengindikasikan seluruh kegiatan dengan resiko telah dilakukan pengendalian. Hal ini perlu dipertahankan dengan tetap menerapkan pengendalian kegiatan yang berbasis manajemen risiko.

Capaian ini apabila dibandingkand engan unit eselon II lingkup Ditjen PSDKP sama dengan capaian unit kerja lain pada angka 100%. Apabila dilakukan perbandingan dengan 5 tahun sebelumnya, capaian ini konsisten pada angka 100%. Hal ini perlu

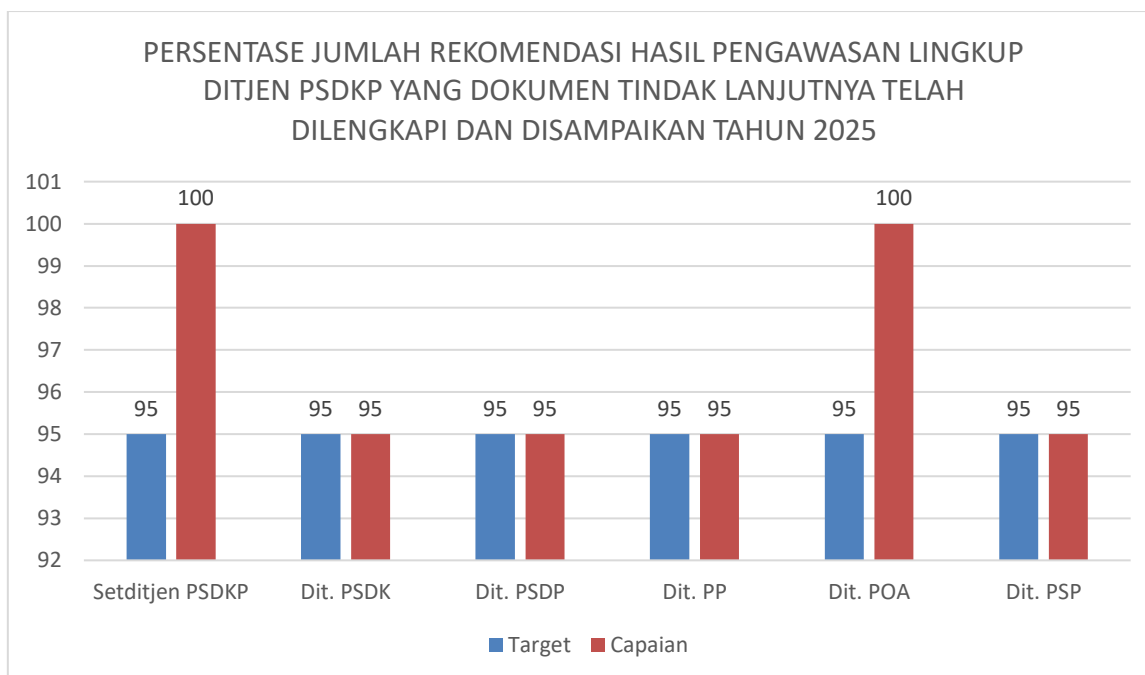
dipertahankan dengan tetap menerapkan pengendalian kegiatan yang berbasis manajemen risiko.



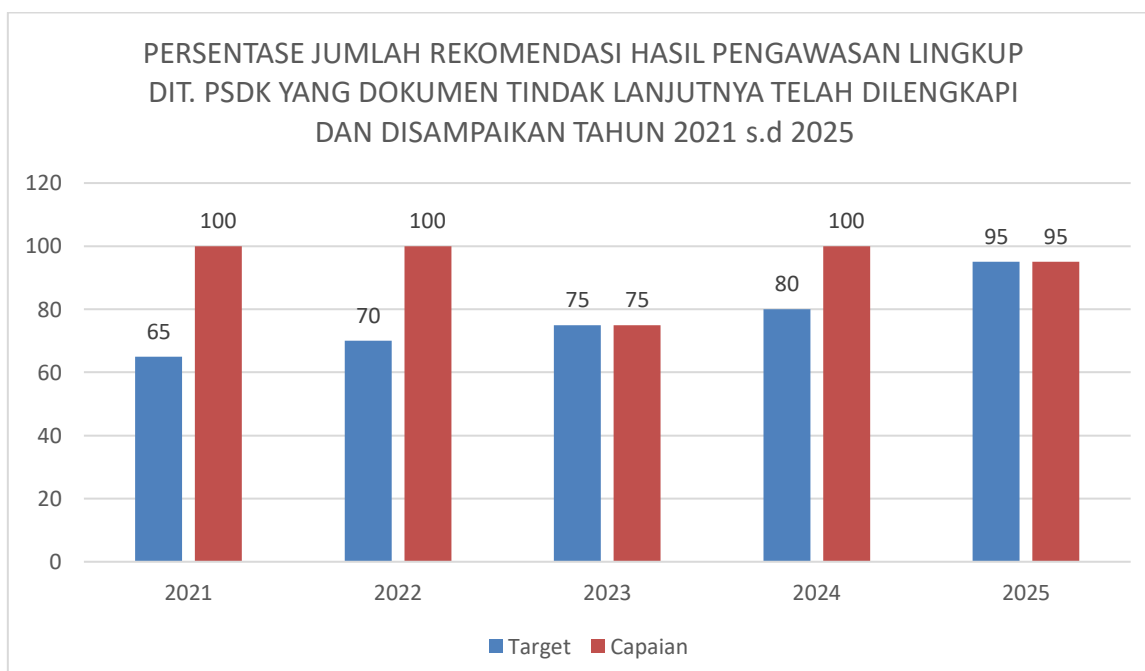
12. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Direktorat PSDK yang dalam hal ini anggaran telah menjadi 1 DIPA di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat suara maupun bab) yang periode tahun 2025 telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat jenderal KKP

Capaian persentasi jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan pada periode tahun 2025 adalah 0 sehingga capaian menjadi 95%. Capaian ini telah melampaui target yaitu 95%. Nilai ini diperoleh sebagai hasil telah ditindaklanjutnya seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat jenderal KKP sampai tahun 2025.



Apabila dibandingkan dengan capaian unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP maka capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan Setditjen PSDKP dan Direktorat POA yang memiliki rekomendasi dan telah ditindak lanjuti, namun capain sama dengan Direktorat PSDP, Direktorat PP dan Direktorat PSP yang tidak memiliki sisa rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti.



Capaian tahun 2025 menurun dari capaian 2024 dari 100% menjadi 95%. Namun pada tahun 2025 tidak memiliki rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dan jika tidak memiliki rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti maka disamakan dengan target yaitu

95%.

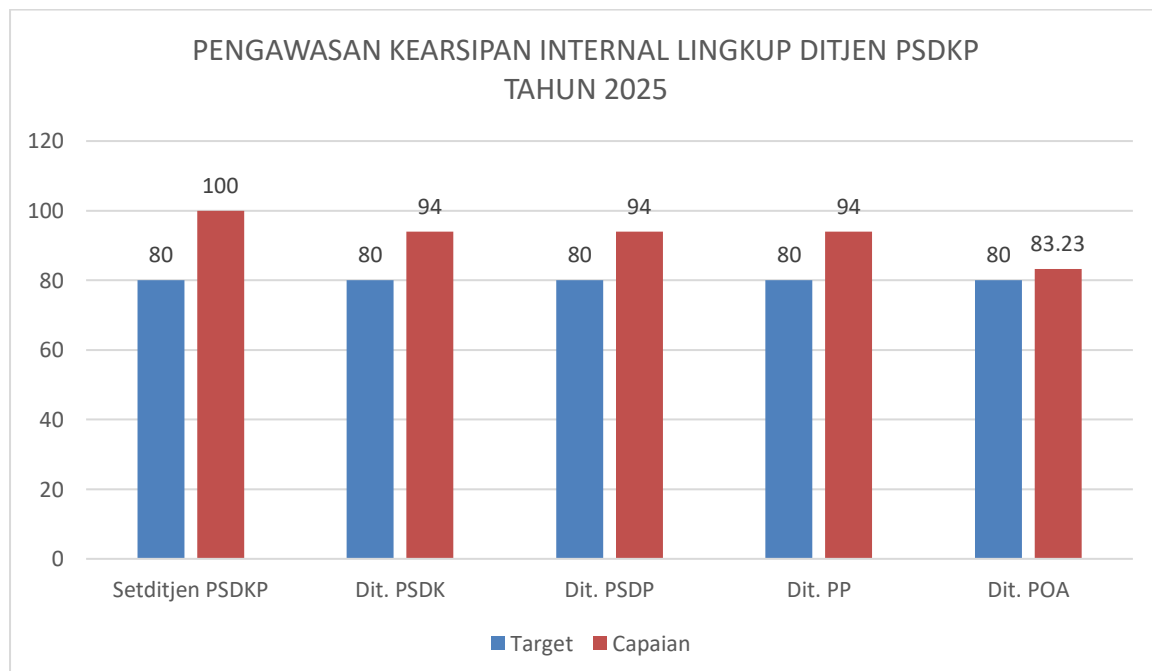
13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi :

1. Pengawasan sistem kearsipan internal,
2. Pengawasan pengelolaan arsip aktif, dan
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal.

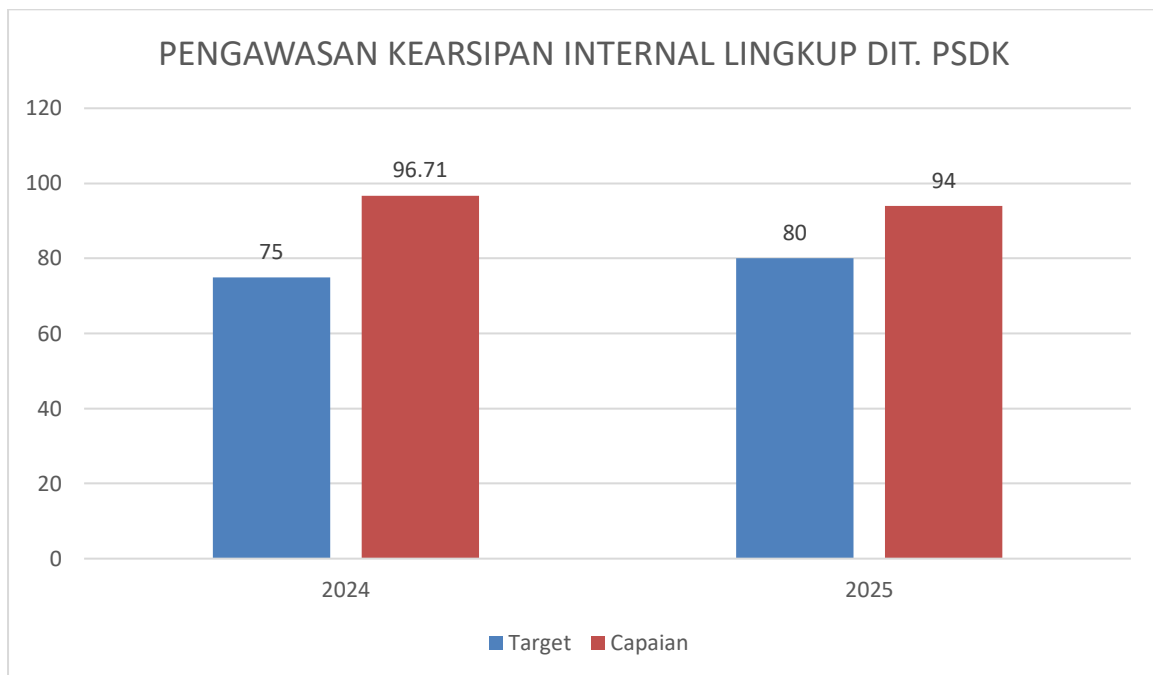
Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ.

Nilai pengawasan arsip internal Direktorat PSDK tahun 2025 adalah 94,00 dengan kategori AA atau sangat memuaskan. Capaian ini sudah melampaui target sebesar 80. Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan capaian unit kerja eselon II lingkup Ditjen PSDKP maka capaian ini lebih rendah dibandingat Setditjen PSDKP, namun lebih tinggi dibandingkan dengan Direktorat POA, dan sama jika dibandingkan dengan Direktorat PSDP dan Direktorat PP.



Capaian 2025 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami penurunan dari 96,71 menjadi 94,00. Namun capaiannya baru bisa dibandingkan dengan

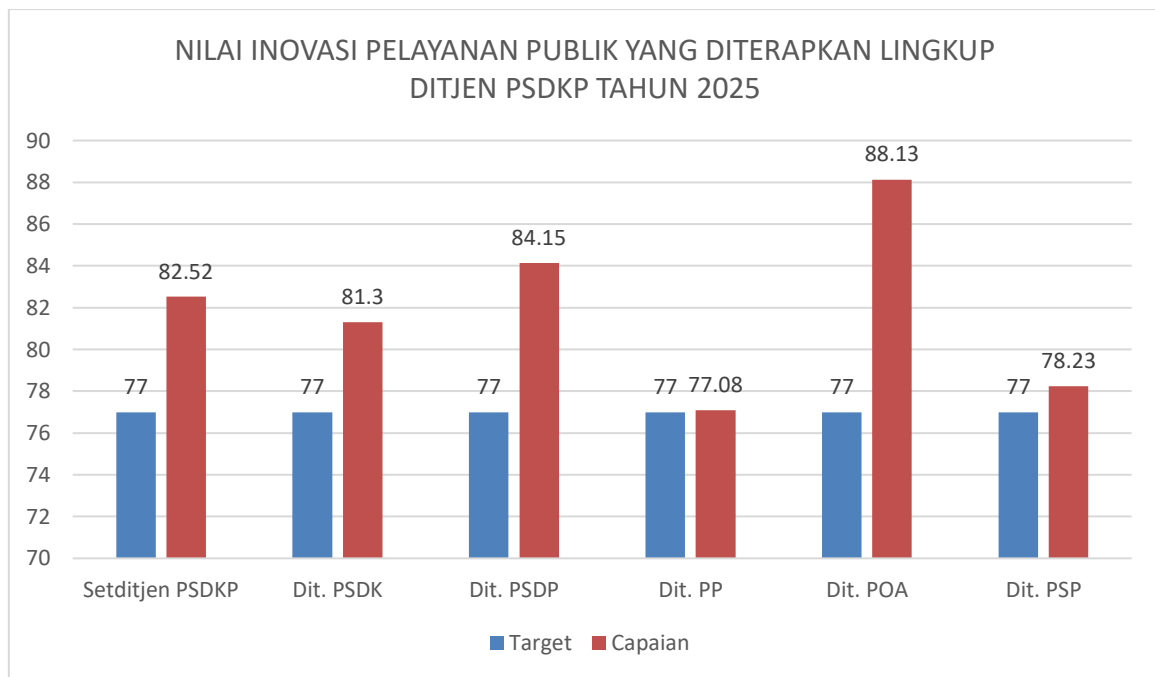
tahun 2024 karena indikator tersebut baru ada pada tahun 2024.



14. Nilai Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Inovasi adalah terobosan pada norma, standar, prosedur, kriteria baik bersifat manual/mekanikal maupun memanfaatkan teknologi informasi pada 8 (delapan) area Perubahan Birokrasi. Inovasi dihasilkan menggunakan konsep Gugus Kendali Mutu, yaitu 8 (delapan) langkah dan 7 (tujuh) alat quality control. Pada tahun 2025 Direktorat PSDK menghasilkan inovasi “MAGIS SDK (Monitoring Actual Geographic Information System Sumber Daya Kelautan)”.

Capaian pada tahun 2025 nilai inovasi adalah 81,30. Capaian ini bila dibandingkan dengan unit kerja eselon II lingkup Ditjen PSDKP maka lebih rendah dari Direktorat POA, Direktorat PSDP dan Setditjen PSDKP, namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan Direktorat PSP dan Direktorat PP.

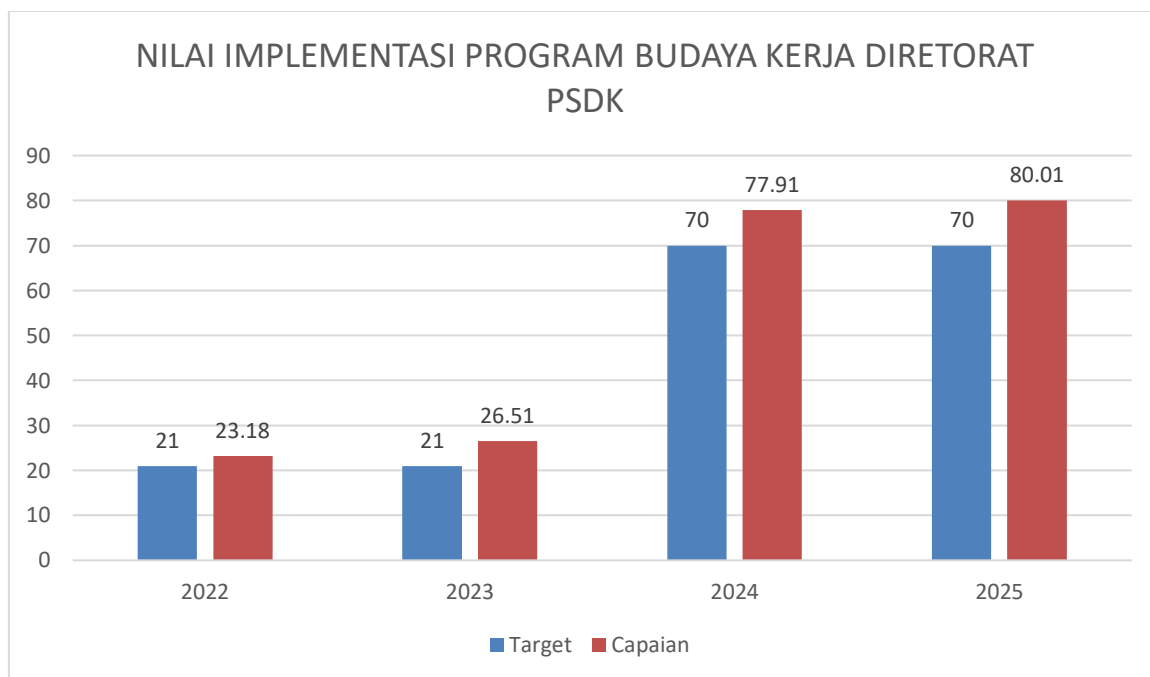


Capaian nilai inovasi pelayanan publik tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025.

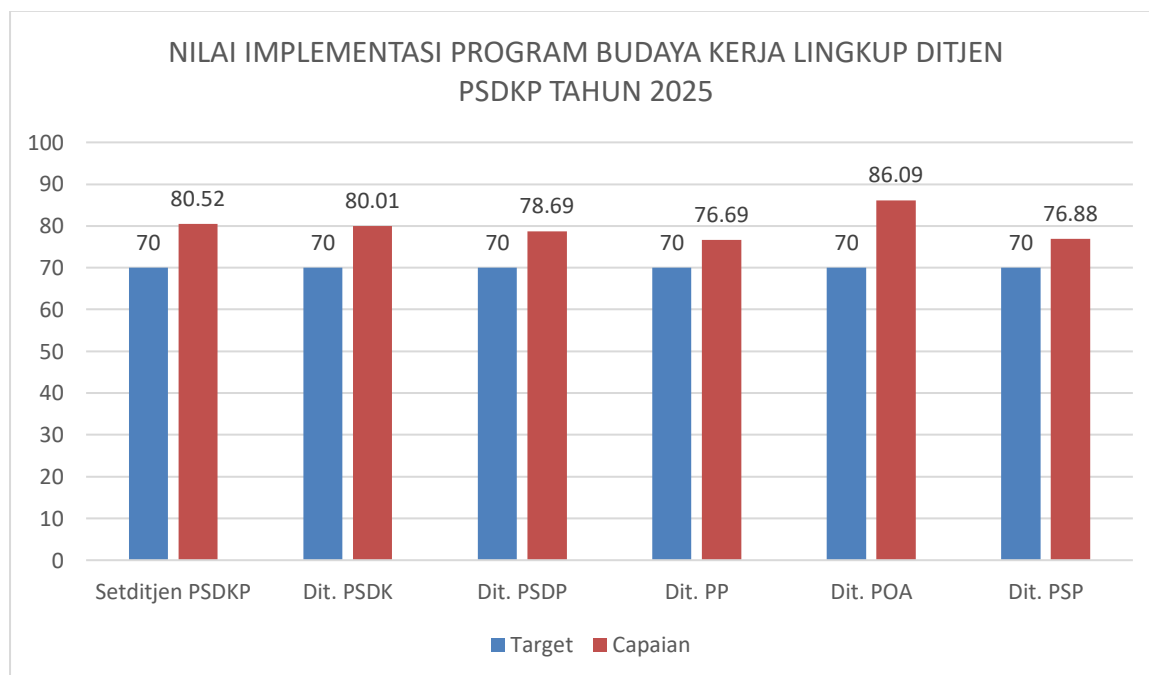
15. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari Lembar Kerja Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Budaya Kerja. Indikator ini adalah indikator yang 2022. Adapun capaian pada tahun 2025 adalah 80.01. Capaian ini telah melampaui target sebesar 70. Capaian ini mengindikasikan bahwa telah dilaksanakannya budaya kerja PSDKP di Direktorat PSDK.

Capaian pada tahun 2025 terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian pada tahun sebelumnya 77,91 menjadi 80.01. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya capaian indikator ini terus meningkat.



Capaian 2025 jika dibandingkan dengan unit kerja eselon II lingkup Ditjen PSDKP lebih rendah jika dibandingkan dengan Setditjen PSDKP dan Direktorat POA, namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan Direktorat PSP, Direktorat PSDP dan Direktorat PP.



C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat PSDK pada tahun 2025 adalah Rp 11.572.471.000,- namun berubah menjadi Rp 2.537.137.000,- karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Sedangkan realisasi anggaran Direktorat PSDK pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.535.805.847,- atau sebesar 99,95% apabila dibandingkan dengan pagu efektif.

Realisasi anggaran pada tersajikan pada tabel berikut:

No	Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Koordinasi Pengawasan SDK	450.000.000	449.574.732
2	Supervisi, Bimtek, Monev	330.449.000	330.203.216
3	Pembinaan Pemda	120.487.000	120.486.572
4	Pemeriksaan Pelaku Usaha	721.991.000	721.748.438
5	Operasi Intelijen	16.954.000	16.954.000
6	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	805.125.000	804.767.687
7	Layanan Umum Rumah Tangga	92.131.000	92.071.202
Total		2.537.137.000	2.535.805.847

Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran lingkup Direktorat PSDK adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang merubah perencanaan kegiatan dan anggaran; dan
2. Adanya kebijakan unit kerja yang seringkali menyebabkan dilaksanakannya revisi anggaran untuk melaksanakan kegiatan.

D. Efisiensi

Direktorat PSDK berupaya melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran kegiatan. Pelaksanaan kegiatan menggunakan sumber daya anggaran dilakukan untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada periode tahun 2025. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana anggaran Kementerian negara/Lembaga, maka dilakukan pengukuran efisiensi kinerja terhadap masing-masing sasaran strategis dimana dalam perhitungannya menggunakan perbandingan target output realisasi output, alokasi anggaran, realisasi kegiatan.

Pada tahun 2025 anggaran unit kerja eselon II Direktrat Jenderal PSDKP masih pada 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas nama Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai efisiensi kegiatan sebesar 4,26%. Nilai ini mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya masih cukup baik. Kedepannya dalam pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan penggunaan

sumber daya yang dimiliki sehingga tercapai sasaran kegiatan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan aplikasi monev.kemenkeu.go.id efisiensi Direktorat Jenderal PSDKP sebesar 42,15. Efisiensi tidak hanya dilihat dari sisi penggunaan anggaran namun juga pengoptimalan sumber daya manusia yang ada di Direktorat PSDK. Pada tahun 2025, Direktorat PSDK dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja saat ini menerapkan efisiensi sumber daya manusia melalui dukungan ketersediaan dan keaktifan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pada masing-masing bidang tugas. SDM di Direktorat PSDK saat ini terdiri dari 24 orang Pengawas Kelautan, 2 orang Perencana, 1 orang arsiparis, 2 orang Analis Pengelolaan APBN, 1 orang pranata keuangan, 4 orang analis pengawasan SDKP, 1 orang pengelola BMN, 2 orang penaya tayanan operasional, 1 orang pengelola layanan operasional dan 2 orang operator layanan operasional.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan kinerja Direktorat PSDK tahun 2025 menampilkan capaian kinerja sasaran strategis Direktorat PSDK selama 1 tahun yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama.
2. Dari 15 indikator kinerja yang memiliki target pada tahun 2025 sebanyak 14 indikator kinerja telah melampaui target dan 1 indikator kinerja yang tidak melampaui target, sehingga ditetapkan dengan nilai NPSS sebesar 104,3 dan dikategorikan baik.

B. REKOMENDASI

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti atas hasil evaluasi kinerja Direktorat PSDK tahun 2025 yaitu:

1. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala berbasis untuk mengetahui keberlanjutan hasil pengawasan sumber daya kelautan;
2. Perlu dilakukan penyamaan penyampaian data sebagai data dukung pengukuran kinerja; dan
3. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengawas kelautan.